

HEGEMONI AGAMA DALAM PERKAWINAN (PERJODOHAN DALAM SATU LINGKUP KEANGGOTAAN KELOMPOK DAKWAH ISLAM)

Eni Palupi, Siany Indria Liestyasari, Nurhadi
Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
palupieni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui relasi kekuasaan dalam perjodohan satu lingkup keanggotaan kelompok Dakwah Islam. (2) Mengetahui hegemoni agama yang terjadi dalam perjodohan kelompok Dakwah Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan praktek perjodohan yang dilakukan, meliputi pelaku perjodohan, tim pernikahan, putri kiai kelompok, guru ngaji dan mantan anggota kelompok tersebut. Tahap analisis penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Relasi kekuasaan yang bersifat dominatif terjadi pada penentuan keputusan dalam mekanisme perjodohan yang dilakukan Kelompok Dakwah Islam. Untuk memilih pasangan yang akan dijadikan suami-istri, anggota Kelompok Dakwah Islam dibatasi dengan kesamaan keanggotaan kelompok. Masuknya anggota kelompok dalam pengajian Usia Nikah ketika telah memasuki umur yang dianggap sesuai, dilakukan secara sepihak. Penunjukan tim pernikahan juga bersifat sepihak oleh Kelompok Dakwah Islam, tim ini juga sebagai perpanjangan dari kelompok dakwah Islam dalam perkawinan para anggotanya. (2) Hegemoni agama dilakukan melalui tafsir sepihak terhadap beberapa ayat suci Alquran dan Hadits yang dijadikan suatu pondasi ideologis dalam Kelompok Dakwah Islam. Melalui pemikiran para anggota tentang suatu penafsiran yang kurang kritis (*common sense*), wacana hegemonik yang merupakan konstruksi yang dialami oleh kelompok tersebut di internalisasikan. Termasuk dalam ranah perkawinan, dimana melalui pemikiran adanya orang luar dan dalam (*outsider-insider*), maka perkawinan hanya dilakukan dalam keanggotaan sehingga perjodohan satu lingkup keanggotaan yang dibantu tim pernikahan terbentuk. Hegemoni agama dalam perkawinan kemudian dilakukan dengan dua metode, baik koersif maupun persuasif yang dilakukan secara beriringan dan terwujud dalam ajaran, dan kultur dalam keanggotaan Kelompok Dakwah Islam, yang menghasilkan hegemoni dalam ranah perkawinan dan perjodohan dalam keanggotaan.

Kata kunci: hegemoni agama, perkawinan kelompok, Kelompok Dakwah Islam

ABSTRACT

The research was aimed to (1) Know the power relation in the arranged marriage of one scope membership of Kelompok Dakwah Islam. (2) Know the hegemony of religion that occurred in arranged marriage of Kelompok Dakwah Islam.

The research used qualitative research method with case study approach. The data collection techniques used in-depth interviews and document study. Techniques of selecting informants used purposive sampling technique. Informants who are used as data sources in this research are people who deal with arranged marriage practices that are done, including the doers of arranged marriage, marriage teams, kiai's daughter of the regional group, teacher, and former member of group. The stage of this research analysis are data reduction, data display and data analysis /verification.

The results showed that (1) Dominative power relation occurs in decision making in the mechanism of arranged marriage which is done by the Kelompok Dakwah Islam. To choose the couple to be married, the members of the Kelompok Dakwah Islam are limited by the similarity of group membership. The inclusion of group members in the study of the marriage age (UNIK) is when they have turned into the appropriate age which is one-sided done. The appointment of the marriage team is also one-sided done by the Kelompok Dakwah Islam, this team is also as an extension Kelompok Dakwah Islam in the marriage of its members. (2) Hegemony of religion is done through one-sided interpretation of several verses of the Qur'an and Hadith which is become as an ideological foundation in the Kelompok Dakwah Islam. Through member's thoughts about a less critical interpretation (common sense), the hegemonic discourse is a construction that is constructed by the group is internalized. Included in the realm of marriage, where through the thought of the outsider-insider, the marriage can only be done in the membership so that arranged marriage of one scope membership who assisted by the marriage teams is formed. Then, hegemony of religion in marriage is done by two methods, both coercive and persuasive which are done in tandem and embodied in the lesson, and culture in the membership of Kelompok Dakwah Islam, which produces hegemony in the realm of marriage and arranged marriage in membership.

Keywords : hegemony of religion, group marriage, Kelompok Dakwah Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terlahir sebagai makhluk sosial dengan kecenderungan untuk selalu hidup saling berdampingan, menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang penting dalam fase kehidupan manusia. Perkawinan membawa manusia dalam suatu relasi sosial baru (Goode, 2004:64), yang dapat memenuhi beberapa fungsi pentingnya, termasuk kebutuhan dasarnya atas seksualitas yang terakui legalitasnya dalam masyarakat (Groenen, 1993:24).

Sebagai suatu penerimaan status baru dalam relasi sosial di masyarakat, urusan perkawinan bukanlah masalah individual semata, namun menyangkut hubungan dua kelompok kekerabatan (Octavio Paz, 1997:22), dimana melalui dua individu yang disatukan dalam perkawinan maka menyatu pulalah dua kelompok kekerabatan tersebut. Sehingga pemilihan calon suami-istri juga merupakan pemilihan terhadap kelompok kekerabatan baru, yang menempati posisi krusial dalam perkawinan.

Pada mulanya, pemilihan calon suami-istri merupakan perkara dibawah kuasa pihak-pihak tertentu seperti orang tua dan kerabat yang dituakan (Groenen, 1993:24) dengan memegang nilai-nilai tradisi dan budaya. Beberapa hal menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh yang terbaik untuk keturunan mereka, termasuk batasan tentang kelompok kekerabatan mana yang boleh dan tidak boleh dinikahi, apakah harus dalam satu kelompok (*endogamy*) atau diluar kelompoknya (*exogamy*) (Kamanto Sunarto, 2004:63).

Dalam masyarakat Jawa, perkawinan termasuk pemilihan jodoh menjadi urusan orang tua mempelai (Cliffort Geertz, 1989:69), dimana kepasrahan mereka terhadap jodoh yang dipilihkan dengan mempertimbangkan faktor jenjang sosial, wawasan keagamaan dan larangan *incest*, dianggap sebagai suatu bentuk pengabdian dan kepatuhannya pada orang tua mereka (Hildred Geertz, 1983:59). Penelitian yang dilakukan *M.E.R Mathivha Centre for African Languages, Art and Culture, School of Human and Social Science*, mendapati

masyarakat Vhavenda, distrik Vembe, Limpopo Afrika Selatan yang menjadikan perjodohan sebagai satu-satunya cara untuk melangsungkan perkawinan. Dimana orang tua mengirimkan anak-anaknya ke sekolah inisiasi budaya untuk membentuk mereka menjadi mitra pernikahan sesuai pespektif budaya, hal tersebut bahkan menjadi suatu prasyarat dalam melangsungkan perkawinan.

Perjodohan yang diatur oleh orang tua dan tradisi tidak selalu disetujui oleh para pelakunya, individu berkeinginan untuk memilih sendiri pasangannya, hal ini telah lama hadir seperti yang diungkapkan Geertz dalam Abangan, Santri, Priyayi tetapi saat itu kehadirannya dianggap sebagai suatu gangguan di tengah tradisi yang telah ada. Perkembangan jaman memudahkan masuknya berbagai kebudayaan baru yang membawa pengaruh terhadap sistem dan struktur dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali tradisi terkait perkawinan yang dianut. Penelitian *University of Chicago* dalam *American Journal of Sociology*, terkait perubahan pola

perkawinan menyebutkan bahwa pengaruh media massa membawa kontak dengan ide-ide baru dan contoh perilaku asing yang berasal dari Eropa Barat dan Amerika Serikat dengan kecenderungan mereka memilih pasangan mereka sendiri. Penelitian *University of Pretoria Afrika Selatan (2012)* tentang tujuan perkawinan pada kalangan pemuda di Malaysia, menemukan adanya motif-motif yang bersifat individual seperti saling cinta, persahabatan, kebahagiaan, harapan, keyakinan pribadi, budaya hidup serta kehidupan individu dalam berbagai motif individu untuk melangsungkan perkawinan. Temuan-temuan tersebut menegaskan perkawinan yang diatur oleh orang tua melalui perjodohan mengalami kemunduran prevalensi, dan lazimnya perkawinan yang dilakukan atas dasar pilihan individu itu sendiri saat ini.

Menariknya, di masa seperti ini hadir pengaturan perkawinan dan praktek perjodohan di tengah masyarakat. Bukan lagi dibawah tradisi dan kebudayaan tetapi dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial yang lahir dan berkembang di

tengah masyarakat, yang tentu saja kemudian perjodohan tersebut dilakukan dengan aturan dan pandangan hidup masing-masing kelompok tersebut, salah satunya mereka yang berbasiskan agama. Agama hadir sebagai sebuah ajaran yang bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya namun lebih dari itu, Thomas F. O'dea (1990:3) mengungkapkan bahwa agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim, sebagai sejumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang membuat manusia beradab. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan merupakan bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk terus bertahan.

Kelompok agama juga memiliki suatu kekuatan tersendiri, dimana mereka memiliki dasar kuat (firman Tuhan) sebagai dogma bagi pengikutnya hingga dapat menghadirkan dominasi dan otoritas terhadap para anggotanya termasuk dalam ranah perkawinan. Seperti pada

penelitian Vita Agustina (2014) mengungkapkan bagaimana Kiai sebagai kaum intelektual atau tokoh berpengaruh di dalam masyarakat yang paham agama menggunakan ketokohan dan kekuasaannya untuk melegalisasi praktek poligami.

Kelompok Dakwah Islam merupakan salah satu kelompok atau organisasi agama yang memiliki pengaturan terkait pemilihan jodoh pada seluruh anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggotanya yang berdomisili di Kota Surakarta, kelompok ini memiliki pengaturan bahwa tiap anggotanya harus melakukan perkawinan dengan sesama anggota kelompok. Selain itu, kelompok memfasilitasi anggota yang siap menikah untuk mengikuti kegiatan “perjodohan” dibantu oleh tim pernikahan yang ada di tiap unit daerah. Dari uraian tersebut, maka kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana relasi kekuasaan dalam perjodohan satu lingkup kelompok mereka, serta bagaimana hegemoni agama terjadi dalam perjodohan satu lingkup kelompok mereka.

Kajian Pustaka

Perkawinan dan Perjodohan dalam Masyarakat

Perkawinan menjadi suatu kajian yang cukup penting dalam studi sosiologi dan antropologi. Pemaknaan yang beragam mengenai perkawinan diberikan oleh beberapa tokohnya, misalnya Groenen (1993:19), memaknai perkawinan sebagai hubungan yang kurang lebih mantap dan stabil antara pria dan wanita (entah seorang atau beberapa orang) menjadi hubungan seksual, yang oleh masyarakat yang bersangkutan (kurang lebih luas) sedikit banyak diatur, diakui dan dilegalisasikan.

Goodenough (Keesing, 1981:6) melihat suatu perkawinan dengan memusatkan pemikiran pada hak atas seksualitas wanita yang diperoleh berdasarkan kontrak. Bagi Paz (1997: 22) memandang perkawinan sebagai suatu relasi antar kelompok yang dilakukan melalui tanda, bukanlah suatu hubungan antar individual semata. Sebagai suatu relasi antar kelompok, perkawinan juga merupakan suatu bentuk proses komunikasi yang terjalin diantara

kelompok-kelompok kekerabatan, dimana wanita merupakan wahana bagi berlangsungnya proses komunikasi tersebut.

Dapat dimaknai pula bahwa perkawinan merupakan relasi antara dua kelompok keluarga/kekerabatan melalui hubungan seksual legal yang mengikat antara pria dan wanita untuk mendapatkan keturunan yang menciptakan suatu hubungan kekerabatan baru dengan segala peran, status, dan kewajiban yang melekat dan harus dijalankan demi terwujudnya berbagai fungsi serta tujuan dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan, tiap kelompok masyarakat memiliki aturan tersendiri yang dianutnya. Kamanto Sunarto (2004:62-63) mengungkapkan, salah satu aturan yang berlaku dalam hubungan perkawinan ialah eksogami dan endogami. Eksogami merupakan sistem yang melarang perkawinan dengan anggota kelompok, sedangkan endogami ialah sistem yang mewajibkan perkawinan dalam satu kelompok.

Selain asal kekerabatan dari calon pasangan, biasanya banyak hal yang menjadi pertimbangan lain adalah kemapanan atau strata, kepandaian, pekerjaan, serta sikap dan santun dari sang calon pasangan yang hendak dipilih menjadi pendamping hidup. Dari aturan serta pertimbangan ini, maka kemudian seseorang biasanya dibantu oleh orang-orang terdekat, utamanya pihak keluarga untuk memilih dan menentukan calon pendampingnya.

Dari sinilah, sebuah perkawinan yang dibantu oleh pihak ketiga terbentuk dan sering kita sebut perjodohan. Perjodohan pada awalnya lebih menitikberatkan pada kelompok kekerabatan, seperti ras, suku, klen dan masalah keturunan (Groenen, 1993:38). Di dalam praktek perjodohan maka ada kelompok yang biasanya adalah orang tua atau kerabat yang dianggap berwenang untuk mengatur terlaksananya perkawinan, sehingga para calon mempelai tidak memiliki kuasa atas perkawinannya. Namun dalam perkembangan jaman dan perubahan sosial budaya, tradisi dan hukum adat

tidak lagi dijalankan, cinta menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh calon mempelai, dan mereka memiliki hukum negara untuk mendukung perlawanan atas hukum adat tentang perjodohan, meski begitu praktek perjodohan masih dipraktekkan oleh penganutnya, menurut hukum adat atau negara/agama.

Di Indonesia sendiri praktek perjodohan awalnya merupakan suatu tradisi di tiap daerah-daerah dengan segala keunikan dan kekhasannya masing-masing. Masyarakat Jawa misalnya, memiliki tradisi tersendiri terhadap sebuah perkawinan dan pemilihan jodoh. Dalam karya etnografi Clifford Geertz terhadap masyarakat Mojokuto yang berjudul "Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa", terdapat pemaparan mengenai proses sebelum melangsungkan perkawinan, bagaimana upacara perkawinan berlangsung hingga bagaimana kemudian sebuah perkawinan bisa dianggap telah berakhir (perceraian) yang dilakukan oleh ketiga golongan. Dalam tradisi masyarakat di Jawa orangtua memiliki kuasa atas

perkawinan anak-anak mereka, mulai dari pemilihan pasangan suami atau istri hingga dalam pengaturan upacara dengan berpegang pada nilai budaya dan tradisi, “Hingga baru-baru ini kebanyakan perkawinan di Jawa masih diatur oleh orangtua mempelai wanita maupun pria” (Clifford Geertz, 1989:69).

Kajian Kelompok Sosial

Terlahir sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kodrat untuk tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dari sinilah kemudian manusia hidup secara berkelompok-kelompok untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan sering disebut kelompok sosial. Terkait pengertian kelompok sosial, Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto(2014:23) mendefinisikan kelompok-kelompok sosial merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur, sehingga daripadanya diharapkan adanya pembagian tugas, struktur, serta norma-norma tertentu yang berlaku bagi mereka.

Terkait dengan proses terjadinya kelompok sosial, Bierens de Haan (Sri Wiyarti, 2007:36) Dikatakan bahwa suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan keterikatan yang ada pada anggota-anggotanya. Kenyataan kelompok ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati bersama oleh fungsi kelompok sebagaimana disadari anggotanya.

Maka, suatu kelompok sosial dalam proses pembentukannya didasari oleh beberapa hal yang penting keberadaannya, yaitu tujuan, harapan dan ideologi senada yang mengikat anggotanya, yang saling berinteraksi secara psikologis/ mental dengan komunikasi yang terjalin balik serta masing-masing memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok.

Telah disebutkan tadi bahwa kelompok sosial bukanlah kelompok statis, setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan dan perubahan masing-masing, hal tersebutlah yang kemudian memungkinkan terjadinya dinamika kelompok sosial. Menurut Heslin (2007:134), dinamika kelompok

merupakan istilah yang digunakan oleh sosiolog untuk merujuk pada bagaimana kelompok mempengaruhi kita dan bagaimana kita mempengaruhi kelompok. Pengaruh itu meliputi bagaimana kelompok telah membawa perbedaan dan pembelajaran kepemimpinan, konformitas, dan pengambilan keputusan.

Hegemoni Antonio Gramsci

Konsep hegemoni merupakan suatu teori sosial yang dibahas oleh beberapa tokoh sebelumnya hingga akhirnya dimantapkan oleh Gramsci sebagai suatu gagasan yang dianggap memiliki orisinalitas, terutama karena kemampuannya memisahkan konsep hegemoninya dengan pendekatan marxisme yang dogmatis (Bocock, 2007:37).

Konsep-konsep hegemoni pada masanya banyak digunakan dalam kaitannya kekuasaan negara dan bagaimana suatu politik dominasi dijalankan, Gramsci merumuskan konsepnya sebagai berikut (William, dalam Nezar Patria dan Andi Arief, 2003:121)

yang merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya” momen”,

dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang : dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari roh ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai klas diktator.

Meskipun terkait erat dengan dimensi kekuasaan suatu negara dan politik, nyatanya konsep hegemoni milik Gramsci memiliki dimensi kebudayaan didalamnya. Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat-masyarakat kapitalis modern diorganisasikan atau dimaksudkan untuk diorganisasikan dalam masa lalu dan masa ini.

Sehingga bukan hanya dapat digunakan dalam memandang kekuasaan dan dominasi suatu negara, konsep Gramsci kemudian dapat digunakan dalam melihat suatu bentuk kekuasaan suatu kelompok dominasi yang mendominasi kelompok lainnya dengan suatu pendekatan khusus hingga

menciptakan suatu hegemonik bagi pihak yang dihegemoni. Dalam suatu hegemoni, suatu wacana atau ideologi menjadi suatu kunci dalam menjalankan dominasi ini, selain itu peran kepemimpinan moral juga sangat penting. Bocock (2007:41), dalam uraiannya mengenai konsep hegemoni dari Gramsci, kepemimpinan hegemonik mencakup mengembangkan persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari semua kelompok utama dalam suatu bangsa. Hal itu mencakup emosional, karena para pemimpin politik yang berusaha mencapai kepemimpinan hegemoni harus memperhatikan sentimen-sentimen dari masyarakat-bangsa dan tidak boleh tampak sebagai makhluk aneh atau asing yang terpisah dari massa.

Agar dapat mencapai hegemoni, ideologi harus disebarkan. Menurut Gramsci (Faruk, 2010:150), penyebaran itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Melainkan melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk sekolahan dan pengajaran, kematangan dan ketidakmatangan relatif bahasa

nasional, sifat-sifat kelompok sosial yang dominan dan sebagainya, termasuk keberadaan kaum intelektual. Hal-hal ini yang kemudian membuat ideologi kemudian dapat terinternalisasi didalam perspektik kelompok yang terhegemoni.

Selain itu peran kaum intelektual dalam hegemoni tidak dapat dipisahkan, disebutkan Gramsci (2013 : 17) bahwa kaum intelektual merupakan wakil dari kelompok dominan yang memiliki fungsi sosial, yang juga menjadi media menyebarkan ideologi hegemonik tadi.

Melalui penjelasan Gramsci atas krisis otoritas, Faruk (2010:141-144) memberikan kesimpulan,

Hegemoni mendefinisikan sifat kompleks dari hubungan antara massa rakyat dengan kelompok-kelompok pemimpin masyarakat, suatu hubungan yang tidak hanya politis dalam pengertian sempit, tetapi juga persoalan mengenai gagasan-gagasan atau kesadaran. Tekanan inilah yang menandakan orisinalitas konsep hegemoni. Apabila marxisme ortodoks memberikan tekanan secara berlebihan pada pentingnya dasar ekonomik masyarakat, sedangkan filsafat liberal pada peranan gagasan-gagasan,

Gramsci berpegang teguh pada penyatuan kedua aspek tersebut secara bersama-sama. Salah satu cara didalamnya “pemimpin” dan “yang dipimpin disatukan lewat “kepercayaan-kepercayaan populer.”

Dari berbagai uraian terkait pemahaman hegemoni milik Gramsci maka, dapat kita simpulkan bahwa hegemoni merupakan suatu bentuk kepemimpinan untuk mendapatkan dominasi atas suatu kelompok melalui ideologi yang disebarkan dengan memperhatikan tokoh intelektual, media penyebaran, karakteristik kelompok tersebut, serta menciptakan suatu kedekatan tertentu, sehingga dengan kesadaran tercipta suatu kepercayaan-kepercayaan yang membentuk dominasi yang direncanakan dan dituju.

Terkait dengan agama, bagi Gramsci agama-agama dianggap beroperasi sebagai wawasan-wawasan dunia yang populer, dengan suatu sistem nilai moral, suatu sistem kepercayaan yang berkaitan dan suatu sistem ritual/simbolik (Bocock 2007:124-125). Gramsci (Bocock 2007:126) mengacu pada gereja Katolik Roma sebagai salah satu

contoh organisasi religius yang tetap. Disini agama memainkan peran yang penting dalam analisis Gramsci tentang peran suatu organisasi kaum intelektual dan massa dalam menghasilkan hegemoni untuk konsep tertentu tentang dunia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menggunakan pendekatan Studi Kasus. Penelitian ini termasuk dalam jenis studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*) (Denzin dan Lincoln, 2009:301). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan, dan studi dokumen terkait melalui website resmi Kelompok Dakwah Islam, buku yang dikeluarkan kelompok tersebut dan penelitian terdahulu yang terkait. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu orang-orang didalam keanggotaan kelompok Dakwah Islam yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan praktek perjodohan. Maka kemudian subyek penelitian yang dipilih meliputi, pelaku perjodohan, tim

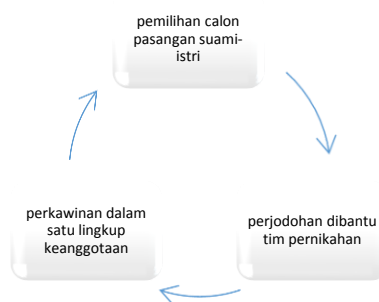
pernikahan, putri kiai kelompok, pengajar, dan mantan anggota sebagai tambahan.

Uji validitas data dilakukan dengan Teknik triangulasi, peneliti menggunakan Teknik Trianggulasi data, melalui wawancara mendalam sebagai proses penggalian data dari sumber yang berbeda, ditambah dengan studi dokumen terkait. Analisis data menggunakan model analisis interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Dominatif dalam Mekanisme Perjodohan Kelompok Dakwah Islam

Skema siklus perkawinan dan perjodohan



Sumber: wawancara peneliti

Terdapat anggapan di dalam pemikiran kelompok dakwah islam bahwa orang-orang yang bukan anggota mereka itu tidaklah sama dengan mereka, sebutan “orang luar” dan “orang kita” memberikan sedikit banyak gambaran terhadap hal

tersebut. Pemikiran yang kelompok dakwah islam miliki membawa dampak besar terhadap berbagai segi kehidupan anggotanya. Termasuk dalam perkawinan yang akan dilangsungkan oleh para anggotanya. Dikarenakan pemikiran bahwa orang diluar keanggotaan berbeda dengan mereka, maka mereka memiliki pemikiran bahwa anggota kelompok hanya menikah dengan sesama anggota yang juga dianggap sebagai suatu kodrat atau ketentuan dari Tuhan yang tidak dapat disangkal.

Pemilihan calon pasangan dilakukan dengan 2 cara, pertama dapat meminta bantuan dari tim pernikahan melalui proses perjodohan. Kedua, anggota dapat secara pribadi menentukan calon pasangannya baik tanpa perantara ataupun direkomendasikan oleh pihak lain, baik keluarga atau orang-orang terdekat. Jadi pada level ini, individu yang mencari jodoh memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan mencari sendiri calonnya atau meminta bantuan pihak ketiga. Namun, dapat dipahami hak ini dibatasi oleh pemikiran keharusan perkawinan dalam satu lingkup

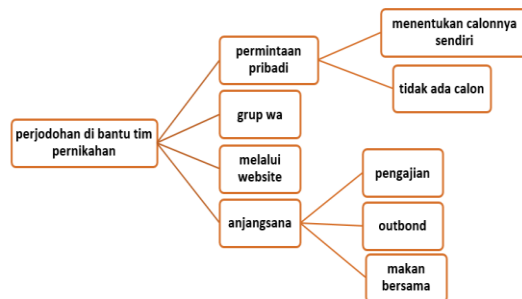
keanggotaan yang harus dijalankan. Meskipun begitu orang dari luar keanggotaan dapat melangsungkan perkawinan dengan anggota kelompok dakwah islam, hanya dengan masuknya orang yang bersangkutan dalam keanggotaan.

Dalam proses perjodohan yang dilakukan, kelompok dakwah islam akan menunjuk satu orang di tiap pengajian kelompok desa yang merupakan kelompok terkecil. Orang yang telah terpilih ini kemudian akan diminta untuk mengurus berbagai urusan terkait perjodohan para anggota dalam kelompoknya. Mereka ini kemudian disebut dengan tim pernikahan. Tim tersebut ditunjuk melalui musyawarah pengurus tanpa kriteria khusus namun dianggap mampu menjalankan tugas sebagai tim pernikahan dengan baik. Penunjukkan tim ini bersifat satu arah, dimana anggota yang terpilih harus melaksanakan tugas yang diberikan. Selain mengurus masalah perjodohan, tim pernikahan juga membantu tiap-tiap anggota kelompoknya yang akan melangsungkan perkawinan.

Kegiatan perjodohan ditujukan untuk para anggota muda yang telah masuk usia pengajian remaja yaitu mulai dari usia sekolah menengah atas keatas (baik kuliah atau bekerja), Mereka kemudian akan ditanyai kesiapannya untuk menikah, dan di kumpulkan dalam kelompok pengajian pra-nikah. Peserta dalam pengajian pra-nikah ini merupakan para anggota kelompok dakwah islam yang masuk kedalam list UNIK atau usia nikah, sehingga sebutan untuk pengajian ini biasa disebut pengajian pranikah atau pengajian usia nikah/ UNIK. Pengelompokkan ini dilakukan oleh para pengurus kelompok tersebut, suatu agenda wajib yang diadakan di tiap kelompok pengajian desa. Masuknya anggota dalam daftar ini pun merupakan sesuatu yang bersifat otomatis, dan menjadi suatu kewajiban bagi anggota yang telah memasuki usia yang ditentukan.

Perjodohan yang dibantu tim pernikahan ini memiliki beberapa variasi dalam penyelenggaraannya. Berikut skema beberapa jalur dalam perjodohan kelompok dakwah islam.

Skema jalur perjodohan

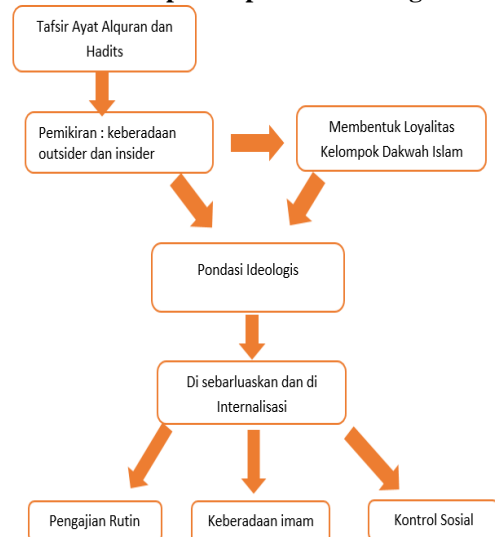


Terlihat andil kuat tim pernikahan sebagai perpanjangan dari kelompok dakwah Islam dalam perkawinan para anggotanya, karena seluruh perkawinan baik melalui perjodohan atau tidak kemudian pada akhirnya akan tetap melibatkan tim pernikahan didalamnya dalam proses lamaran yang harus disampaikan melalui tim pernikahan masing-masing kelompoknya.

Hegemoni Agama dalam Perkawinan

Pembentukan konstruksi adanya orang dalam-orang luar dalam keanggotaan Kelompok Dakwah Islam yang menjadi suatu pondasi ideologis dalam hegemoni agama yang terjadi pada kelompok tersebut. Proses tersebut akan disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut.

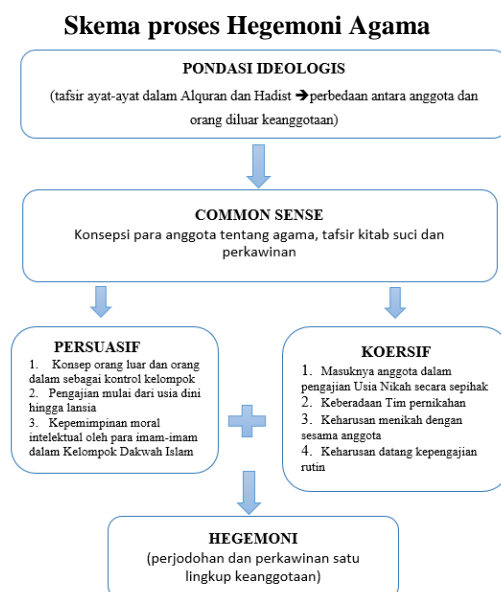
Skema proses pondasi ideologis



Pondasi ideologis yang disebarluaskan dan di internalisasikan kepada para anggota Kelompok Dakwah Islam terlihat dalam ajaran dan kultur kelompok tersebut, hal ini pada akhirnya sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari para anggotanya. Termasuk menciptakan suatu hegemoni dalam ranah perkawinan bagi para anggota dengan landasan agama. Hegemoni dalam perkawinan dengan bentuk lain juga di singgung oleh Budi Rhajab (2003:67-82) dalam membahas masalah poligami. Dalam pembahasannya, praktek poligami yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu bentuk hegemoni

struktur budaya patriarki yang dominan dan mengakar, ditambah memiliki dukungan legitimasi dari agama, serta negara yang bahkan, melegalkannya dalam bentuk undang-undang, yang pada akhirnya membawa dampak ketertindasan bagi perempuan dan dominasi bagi laki-laki.

Perjodohan dan perkawinan yang dilakukan hanya dalam satu lingkup keanggotaan Kelompok Dakwah Islam merupakan bentuk hegemoni agama yang kemudian dianalisis dengan konsep hegemoni Gramsci untuk mengetahui bagaimana hegemoni agama tersebut berlangsung. Berikut skema proses hegemoni tersebut.



Agama memberikan jawaban terhadap masyarakat atas sesuatu diluar kuasa manusia yang dapat menjawab fakta karakteristik dasar eksistensi manusia, yaitu ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan (O’dea, 1990:7).

Kekuatan inilah pula yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial yang berbasiskan agama dalam masyarakat untuk membangun massa. Ini pula yang dijabarkan Askian Adam (1999:39), dengan tertulisnya beberapa hal tentang perempuan dalam literatur agama, kemudian interpretasi atasnya menjadi sebuah hal yang sulit untuk disangkal, misalnya dalam persoalan hak waris yang hanya setengah dari saudara laki-lakinya, perkara ini tampaknya menjadi mutlak untuk ditaati sebagai perintah Tuhan yang berkonsekuensi tentang surga neraka.

Dalam agama Islam sendiri, ajaran yang diberikan oleh penganutnya bersumberkan kepada kitab suci, meliputi kitab suci Alquran dan Hadist. Kitab suci tersebut kemudian harus dimaknai untuk kemudian dapat menjadi suatu pedoman hidup bagi seluruh umatnya.

Disinilah titik dimana kitab suci Alqur'an dan Hadits ini menjadi suatu media hegemonik, manakala tafsir yang dilakukan bukan lagi murni bersifat agamis namun memuat sisi ideologis untuk tujuan-tujuan tertentu yang mempengaruhi interpretasi atas tafsir yang diberikan. Seperti tafsir kitab suci yang lebih dipengaruhi oleh struktur patriarkal (Engineer, 2003:84).

Termasuk dalam pembentukan suatu kelompok sosial yang berbasiskan/berasaskan agama seperti Kelompok Dakwah Islam. Dimana dengan mengambil beberapa ayat dalam Alquran dan Hadist, mereka membentuk pandangan hidup, dan tujuan yang hendak dicapai dalam kelompok tersebut. Hal ini dilakukan dengan tafsir sepihak atas beberapa ayat kitab suci untuk mengalamiahkan kontruksi yang dibentuk kelompok tersebut. Sebuah kontruksi yang membedakan anggota kelompok dengan orang-orang diluar keanggotaan, kontruksi yang selain membentuk kelompok sekaligus membangun suatu loyalitas kuat dari para anggotanya. Loyalitas ini menjadi sesuatu yang penting

keberadaannya, bahkan Friedrich Engels diungkapkan Adriana Veni (2002:118) dalam tulisannya, menuding loyalitas menjadi tujuan dari konsep cinta dalam perkawinan yang dipelintir masyarakat borjuis kapitalis untuk mengekang perempuan agar tetap tinggal ditempat.

Gagasan tentang perkawinan tersebut kemudian menjadi bagian dari kontruksi yang dibangun Kelompok Dakwah Islam. Bagaimana gagasan tersebut kemudian menjadi hegemonik bagi para anggotanya, dijelaskan oleh Gramsci sebagai sesuatu yang disebutnya *commen sense* atau pemikiran orang awam, tempat dimana ideologi dominan dibangun.

Common sense bagi Gramsci merupakan konsepsi tentang dunia yang paling pervasif tetapi tidak sistematis. Dalam kasus ini *common sense* dapat dimaknai sebagai pemikiran para anggota kelompok, yaitu konsepsi terhadap tafsir kitab suci dan pemahaman agama yang mereka miliki termasuk pandangan mengenai perkawinan yang baik, yang bersifat kolektif. Pada *common*

sense yang menonjol adalah ciri-ciri yang tersebar, tak terkoordinasi, dari bentuk pikiran bersama pada periode yang khusus dan dalam lingkungan yang khusus pula (Faruk, 2010:146). Dengan pandangan *common sense* ini pula, dimensi hegemoni milik Gramsci menuntut adanya kontak antara yang memimpin dan yang dipimpin, pada ranah perkawinan kita bisa melihat kehadiran tim pernikahan pada tiap kelompok pengajian daerah yang begitu dekat keberadaannya dengan para anggotanya. Hingga hadirnya perjodohan yang diatur dan diurus langsung oleh para tim pernikahan tersebut

Kelompok Dakwah Islam untuk mendapatkan supremasi atas para anggotanya melakukan pendekatan yang maksimal, baik persuasif maupun koersif sehingga menjadi hegemonik bagi anggotanya. Dalam ranah perkawinan pun dilakukan dengan hal yang sama. Keberadaan gagasan adanya perbedaan antara orang luar dan dalam dari keanggotaan menjadi suatu kontrol sosial bagi para anggota. Pengajian yang dilakukan secara rutin bahkan

diperuntukkan bagi para anggota dari semua jenjang umur mulai dari usia dini hingga lansia, serta adanya pengajian kelompok usia nikah dimana terdapat penekanan yang dilakukan terkait masalah perkawinan satu keanggotaan, yang dilakukan dengan pendekatan alur pikir para anggota dengan ideologi mereka, sekaligus menjadi suatu media internalisasi ajaran-ajaran yang dimiliki oleh Kelompok Dakwah Islam.

Peran para tokoh-tokoh agama memiliki fungsi sosial tersendiri dalam proses terjadinya hegemoni. Bahkan dalam Kelompok Dakwah Islam diketahui bahwa peran kiai dalam kelompok yang biasanya disebut imam memiliki posisi yang kuat, dimana imam disini dianggap sebagai pembimbing, panutan dan guru yang harus dipatuhi, hal ini menjadi bentuk kepemimpinan moral intelektual yang terjadi dalam kelompok tersebut.

Selain hal-hal tadi, secara koersif Kelompok Dakwah Islam juga dilakukan kepada para anggotanya. Seperti keharusan anggota-anggota yang memasuki usia Sekolah

Menengah Atas dan di atasnya ke dalam UNIK, yaitu kelompok pengajian dan juga obyek yang nantinya akan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan perjodohan dari tim pernikahan. Masuknya anggota ke dalam pengajian kelompok UNIK, merupakan suatu kontrak tak tertulis yang harus ditaati oleh anggotanya ketika ia mulai masuk ke dalam keanggotaan Kelompok Dakwah Islam secara otomatis. Keberadaan tim pernikahan sendiri menjadi suatu alat pengendali dari hegemoni dalam perjodohan satu lingkup kelompok ini. Suatu bentuk paksaan yang sangat kentara tentu saja terlihat dalam pengaturan perkawinan para anggota yang harus dilakukan dalam satu lingkup keanggotaan. Hal ini bahkan menjadi suatu kesulitan dan ganjalan ketika anggota (*insider*) akan menikah dengan orang diluar keanggotaan (*outsider*). Bentuk lainnya terlihat dari keharusan para anggota mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Kelompok Dakwah Islam, hal ini didapat dari penjelasan informan yang mengungkapkan bahwa ketika anggota tidak rajin atau membolos

dalam pengajian, akan ada pengurus atau imam yang akan menegur dan menasehati anggota tersebut, hal ini dianggap semacam pelanggaran.

Tafsir sepihak atas Alquran dan Hadist yang menghasilkan berbagai kontruksi yang dialamiahkan dengan landasan agama terasa sebagai suatu kodrat bagi anggota kelompok, seperti dalam tafsir ayat-ayat Alquran yang seringkali digunakan untuk mendukung legitimasi sebuah poligami dalam masyarakat oleh kaum patriarkal (Farida, 2002:74). Hal ini membuat mereka merasa secara sadar melakukan perkawinan dalam satu lingkup keanggotaan kelompok. Praktek perjodohan yang dikembangkan juga diikuti oleh para anggotanya dengan sukarela, tanpa mempertanyakan kebenarannya. Mereka merasa bahwa konsep orang luar orang dalam, perbedaan beberapa hal dalam cara beribadah mereka merupakan suatu kebenaran mutlak yang seharusnya dilakukan tanpa sanggahan. Sehingga ideologi kelompok telah menjadi ideologi pula dalam perspektif tiap-tiap anggota. Perkawinan dalam lingkup keanggotaanpun merupakan hal yang

sah-sah saja dan benar keberadaannya, malah ketika hal itu dilanggarlah maka terjadi suatu penyimpangan bagi mereka. Praktek perjodohan pun menjadi suatu hegemonik bagi para anggotanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Relasi kekuasaan yang bersifat dominatif terjadi pada penentuan pasangan yang akan dijadikan suami-istri, anggota Kelompok Dakwah Islam dibatasi dengan kesamaan keanggotaan kelompok, sehingga perkawinan tidak terjadi dengan orang di luar keanggotaan. Masuknya anggota kelompok dalam pengajian Usia Nikah (UNIK) ketika telah memasuki umur yang dianggap sesuai, dilakukan secara sepihak. Penunjukan tim pernikahan juga bersifat sepihak oleh Kelompok Dakwah Islam, tim ini juga sebagai perpanjangan dari kelompok dakwah Islam dalam perkawinan para anggotanya.

Hegemoni agama dilakukan melalui tafsir sepihak terhadap beberapa ayat suci Alquran dan Hadits yang dijadikan suatu pondasi

ideologis dalam Kelompok Dakwah Islam. Melalui pemikiran para anggota tentang suatu penafsiran yang kurang kritis (common sense), wacana hegemonik yang merupakan kontruksi yang dialami oleh kelompok tersebut di internalisasikan. Termasuk dalam ranah perkawinan, dimana melalui pemikiran adanya orang luar dan dalam (outsider-insider), maka perkawinan hanya dilakukan dalam keanggotaan sehingga perjodohan satu lingkup keanggotaan yang dibantu tim pernikahan terbentuk. Hegemoni agama dalam perkawinan dilakukan dengan dua metode, baik koersif maupun persuasif.

Saran

Sebaiknya para pelaku perjodohan meminta kepada pihak tim pernikahan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai calon pasangannya termasuk diadakannya pertemuan dengan orang terdekat untuk menggali informasi seperti teman, saudara dan orang tua calon pasangan sebelum memutuskan dilakukannya perkawinan, sehingga menjadi suatu pertimbangan mendalam.

Hendaknya Kelompok Dakwah Islam memberikan pendampingan lebih yang dilakukan dalam bentuk pemberian materi dalam bentuk pangajian khusus, maupun konsultasi yang dilakukan oleh pihak Kelompok Dakwah Islam kepada para pasangan suami-istri hasil perjodohan yang dibantu oleh tim pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bocock, Robert. (2007). *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Denzin, K.N., & Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Engineer, Asghar Ali. (2003). *Matinya Perempuan (Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki)*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- F. O'Dea , Thomas. (1990). *Sosiologi Agama*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Farida. (2002). *Jurnal Perempuan, Memikirkan Perkawinan*, No. 22 : 74. Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Faruk. (2010). *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. (1989). Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. (1983). Jakarta : PT. Temprint.
- Gramsci, Antonio. (2013). *Prison Notebooks Catatan Catatan dari Penjara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Groenen. (1992). *Perkawinan Sakramental (Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral)*. Yogyakarta : Kanisius.
- J. Goode, William. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Heslin, James. (2007). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta:Erlangga.
- M. Keesing, Roger. (1981). *Antropologi Budaya Suatu Prespektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto. (2014). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Prenadamedia group.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. (2003). *Antonio Gramsci : Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Paz, Octavio. (1997). *Levi-Strauss (Empu Antropologi Struktural)*. Yogyakarta : Gambiran UH V.
- Rhajib, Budi. (2003). *Jurnal Perempuan, Menimbang Poligami*, No. 31 : 67-82. Jakarta Selatan : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rajagrafindo.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. (2004). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Syarbaini, Syahril dan Rusdiyanta. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Veni, Andriana. (2002). *Jurnal Perempuan, Memikirkan Perkawinan*, No. 22 : 118. Jakarta Selatan : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Wiyarti, MG Sri dan Sutapa Mulya Widada. (2007). *Sosiologi*. Surakarta : UNS Press
- Agustina, Vita. (2014). *Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami* (Versi elektronik). *Jurnal Musawa*, Vol. 13 No. 2. Diperoleh pada 5 Februari 2017, dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Dirgha J. Ghimire, William G. Axinn, Scott T. Yabiku, & Ariand Thor. (2006). *Social Change Premarital Nonfamily Experience, and Spouse Choice in an Arranged Marriage Society*. *AJS* Volume 111 Number 4 January 2006. Diperoleh pada 15 Mei 2017, dari <http://umich.edu>
- Jamiah Manap, Arena Che Kassim, Suzana Hoesni, Salina Nen, Fazilah Idris & Fatihah Ghazali. (2012). *The Purpose of Marriage Among Single Behavioral Sciences*, 82(2013) 112-116. Diperoleh pada 5 Februari 2017, dari <http://sciencedirect.com>
- M, Hilmi. (2012). *Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur*. Desertasi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- T. D. Raphalalani and N. M. Musehane. (2013). *Arranged Marriage Practices of the Vhavenda Community of the Vhembe District, Limpopo Province, South Africa*. Volume 4(2) pp18-22 April 2013. Diperoleh pada 15 Mei 2017, dari <http://sciencedirect.com>